

**MANAJEMEN KONFLIK PADA KONFLIK PENGUSAHA
ANGKOT LUBUK BUAYA-PASAR RAYA DENGAN TRANS
PADANG KORIDOR 1 TAHUN 2024**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh:

Gilang Rizki Muhammad

NIM. 2110833004



Dosen Pembimbing:

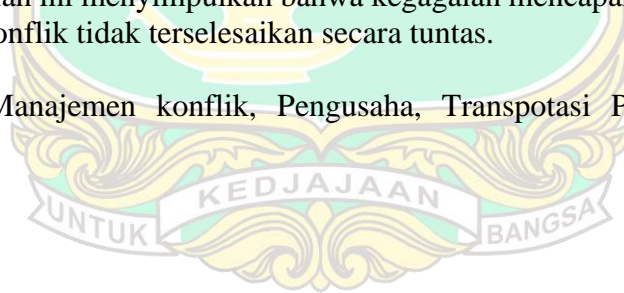
- 1. Dewi Anggraini, S.IP., M.Si**
- 2. Dr. Zulfadli, SHI., M.Si**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen konflik antara pengusaha angkot trayek Pasar Raya–Lubuk Buaya dengan Trans Padang Koridor 1 pada tahun 2024. Konflik ini muncul akibat ketidakjelasan mekanisme integrasi angkot ke dalam sistem Trans Padang, meskipun pengusaha angkot telah melakukan peremajaan armada sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 104 Tahun 2020. Ketidakpastian tersebut menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada aksi demonstrasi oleh pengusaha angkot. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Informan dipilih secara *purposive sampling* yang melibatkan Dinas Perhubungan Kota Padang, pengelola/operator Trans Padang, serta pengusaha angkot Koridor 1. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber. Kerangka analisis penelitian ini menggunakan teori manajemen konflik Schermerhorn yang terdiri dari lima indikator, yaitu *avoidance* (penghindaran), *accommodation* (akomodasi), *competition* atau *authoritative command* (kompetisi atau perintah berwenang), *compromise* (kompromi), dan *collaboration* atau *problem solving* (kolaborasi atau pemecahan masalah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen konflik dalam kasus ini belum berjalan secara efektif. Tahap awal konflik ditandai dengan penghindaran institusional, di mana pihak Trans Padang dan Dinas Perhubungan cenderung saling melempar tanggung jawab sehingga keluhan pengusaha angkot tidak tertangani secara substantif. Kondisi tersebut memicu eskalasi konflik berupa demonstrasi. Upaya penyelesaian kemudian bergerak ke arah akomodasi melalui pertemuan dan dialog, namun bersifat sementara dan belum menghasilkan solusi konkret. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan mencapai tahap kolaborasi menyebabkan konflik tidak terselesaikan secara tuntas.

Kata kunci: Manajemen konflik, Pengusaha, Transpotasi Publik, Angkutan Umum.



ABSTRACT

This study aims to analyse conflict management in the dispute between public minibus entrepreneurs operating the Pasar Raya–Lubuk Buaya route and Trans Padang Corridor 1 in 2024. The conflict emerged due to the lack of clarity regarding the integration mechanism of minibus operators into the Trans Padang system, despite fleet renewal efforts in accordance with Padang Mayor Regulation No. 104 of 2020. This uncertainty created dissatisfaction among minibus entrepreneurs and led to public demonstrations. This research employs a qualitative case study approach. Informants were selected through purposive sampling and included officials from the Padang City Transport Office, Trans Padang operators, and Corridor 1 minibus entrepreneurs. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. Data validity was ensured through source triangulation. The study adopts Schermerhorn's conflict management theory as its analytical framework, which consists of five indicators: avoidance, accommodation, competition or authoritative command, compromise, and collaboration or problem solving. The findings indicate that conflict management in this case was not effectively implemented. The initial stage of the conflict was characterised by institutional avoidance, where Trans Padang and the Transport Office tended to shift responsibility, resulting in unresolved grievances from minibus entrepreneurs. This condition escalated the conflict into public demonstrations. Subsequent resolution efforts moved toward accommodation through meetings and dialogue; however, these efforts were temporary and failed to produce concrete outcomes. The study concludes that the absence of collaborative conflict management prevented the achievement of a sustainable resolution to the conflict.

Keywords: *conflict management, entrepreneurs, Public transportation, public transportation*

